

## Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) 38 Provinsi di Indonesia 2023-2025

Mardyan Nugraha Ridhowati<sup>1</sup>, Anton Bawono<sup>2</sup>, Rina Rosia<sup>3</sup>

<sup>1)</sup><sup>3)</sup>Universitas Islam Negeri Salatiga, <sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: [dian47670@gmail.com](mailto:dian47670@gmail.com)<sup>1)</sup>\*, [anton.bawono@uin-suka.ac.id](mailto:anton.bawono@uin-suka.ac.id)<sup>2)</sup>, [rinarosia@uinsalatiga.ac.id](mailto:rinarosia@uinsalatiga.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran, dan kemiskinan terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di 38 provinsi di Indonesia periode 2023–2025. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis menggunakan regresi data panel pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap I-HDI dengan nilai  $R^2$  sebesar 93,66%. Secara parsial, PDRB dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap I-HDI. Koefisien positif pengangguran diduga merepresentasikan karakteristik wilayah maju dengan konsentrasi pengangguran terdidik yang memiliki modal manusia (*human capital*) tinggi. Sementara itu, tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap I-HDI. Ketidaksignifikanan ini mengindikasikan adanya ketahanan pembangunan manusia Islami terhadap guncangan materiil, yang berpotensi didorong oleh keberadaan jaring pengaman sosial informal dari instrumen filantropi Islam (ZISWAF). Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan ekonomi inklusif yang menysasar mutu modal manusia serta optimalisasi integrasi instrumen sosial keagamaan.

**Kata kunci:** I-HDI; Kemiskinan; Maqasid Syariah; PDRB; Pengangguran.

### Abstract

*This study aims to analyze the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), unemployment rate, and poverty on the Islamic Human Development Index (I-HDI) across 38 provinces in Indonesia during the 2023–2025 period. Secondary data were sourced from Statistics Indonesia (BPS) and analyzed using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results indicate that simultaneously, the three independent variables significantly affect I-HDI with an  $R^2$  value of 93.66%. Partially, GRDP and unemployment have a positive and significant impact on I-HDI. The positive coefficient of unemployment presumably represents the characteristics of developed regions with a concentration of educated unemployment who maintain high human capital. Meanwhile, the poverty rate has no significant effect on I-HDI. This insignificance indicates the resilience of Islamic human development against material shocks, which potentially driven by the existence of informal social safety nets from Islamic philanthropic instruments (ZISWAF). This study recommends strengthening inclusive economic policies targeting human capital quality and optimizing the integration of socio-religious instruments.*

**Keywords:** *Gross Regional Domestic Product (GRDP); Islamic Human Development Index (I-HDI); Maqasid Sharia; Poverty; Unemployment.*

### Pendahuluan

Paradigma pembangunan global saat ini mulai bergeser dari sekadar pengejaran pertumbuhan ekonomi materiil menuju penguatan kualitas hidup manusia yang lebih holistik.

Dalam konteks Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah lama menjadi tolok ukur standar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai angka 74,39, yang dikategorikan sebagai status pembangunan tinggi. Akan tetapi, instrumen IPM konvensional memiliki limitasi dalam mengintegrasikan dimensi spiritualitas dan nilai keagamaan yang menjadi karakteristik fundamental masyarakat religius.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, I-HDI muncul sebagai instrumen evaluasi yang menyelaraskan capaian kesejahteraan dengan prinsip Maqasid Syariah. Formulasi indeks ini berakar kuat pada teori kemaslahatan publik (*al-maslahah*) yang diakselerasi oleh Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, dengan mengukur tingkat perlindungan terhadap lima kebutuhan dharuriyah: agama (*Hifdz ad-Din*), jiwa (*Hifdz an-Nafs*), akal (*Hifdz al-Aql*), keturunan (*Hifdz an-Nasl*), dan harta (*Hifdz al-Maal*). Pengukuran komposit ini dinilai lebih representatif dalam merefleksikan hakikat pembangunan manusia seutuhnya dalam perspektif Islam (Chapra, 2000).

Implementasi I-HDI di Indonesia saat ini dihadapkan pada dinamika spasial pasca restrukturisasi administratif menjadi 38 provinsi. Sepanjang periode 2023–2025, fluktuasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi determinan utama yang memperluas ruang fiskal daerah guna pengadaan infrastruktur publik. Pada sektor ketenagakerjaan, fenomena tingginya angka pengangguran di tingkat provinsi memerlukan dekonstruksi sudut pandang akademik. Merujuk pada *human capital theory*, tingginya angka pengangguran yang disertai dengan peningkatan partisipasi pendidikan mengindikasikan gejala pengangguran terdidik. Kelompok ini merepresentasikan akumulasi modal manusia berkemampuan tinggi yang belum terutilisasi secara optimal oleh struktur pasar kerja, namun memiliki kontribusi laten terhadap dimensi akal (*Hifdz al-Aql*) dalam I-HDI. Sementara itu, pada dimensi kesejahteraan sosial, meskipun tingkat kemiskinan moneter masih menjadi disinsentif pembangunan, potensi alokasi instrumen jaring pengaman sosial non-pasar seperti dana kebajikan Islam secara teoritis berperan memitigasi penurunan standar hidup minimum masyarakat pada kelompok rentan.

Meskipun kajian mengenai pembangunan manusia berbasis syariah telah banyak dilakukan, terdapat ketidakkonsistenan hasil dalam literatur terdahulu. Studi oleh Lubis et al., (2023) dan Ningrum et al., (2020) secara tegas menyatakan bahwa pengangguran dan kemiskinan merupakan faktor penghambat utama yang menekan angka kesejahteraan. Namun, perolehan hasil berbeda ditemukan oleh Rama & Yusuf, (2019) yang mengindikasikan bahwa dimensi sosial keagamaan dalam I-HDI cenderung memiliki resistensi terhadap fluktuasi kemiskinan materiil. Ketidakpastian determinan ini juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kadir et al., (2026) yang menemukan bahwa pengangguran makro memiliki sensitivitas tinggi terhadap laji I-HDI dinegara muslim, sementara Rozaq & Darwanto, (2024) justru membuktikan bahwa penguatan dimensi I-HDI secara efektif bertindak sebagai pengentas kemiskinan di negara-negara D-8. Adanya pertentangan temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel ekonomi makro terhadap kualitas hidup Islami belum mencapai titik temu, sehingga memerlukan pengujian ulang pada fokus yang lebih luas dan terkini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini memfokuskan untuk mengatasi kesenjangan literatur tersebut dengan pembaruan pada aspek ruang lingkup dan konseptual. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada penggunaan basis data spasial terbaru mencakup 38 provinsi pasca pemekaran wilayah, pembatasan periode kontemporer 2023-2025 serta penerapan pendekatan I-HDI berbasis rata-rata geometrik. Secara eksplisit, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh PDRB, tingkat pengangguran, dan kemiskinan terhadap pencapaian I-HDI di 38 provinsi di Indonesia periode 2023–2025. Melalui pendekatan regresi data panel,

luaran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pembuat kebijakan dalam memformulasi strategi pembangunan daerah yang inklusif dan selaras dengan koridor Maqasid Syariah.

## Kajian Teori

### Konsep Pembangunan dalam Perspektif Islam

Dilihat dari perspektif Islam, pembangunan mempunyai paradigma yang berkebalikan secara fundamental dengan konsep konvensional yang hanya cenderung materialistik. Pembangunan manusia bukan hanya suatu upaya untuk meningkatkan indikator ekonomi makro, melainkan sebuah proses integral untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat dan kehidupan yang baik, karena menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (Chapra, 2000). Oleh karena itu, dalam pembangunan Islam menganggap pembangunan sebagai aktivitas ibadah untuk memakmurkan bumi dan menjaga keseimbangan lingkungan serta keadilan sosial (Arifqi, 2019). Semua konsep tersebut akan diwujudkan melalui kerangka dari Maqasid Syariah yang secara operasional diukur menggunakan I-HDI. Melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan di 38 Provinsi Indonesia dapat dianalisis sejauh mana pencapaian pembangunan dengan nilai-nilai kemaslahatan syariah.

### Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam merepresentasikan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat disuatu daerah dengan periode tertentu, digunakan indikator utama yang dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (Nurlayli & Jumarni, 2022). Dengan menggunakan acuan dasar pada standar perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), penggunaan PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku ditujukan untuk menggambarkan keragaman struktur ekonomi serta nilai nominal produksi barang dan jasa pada periode berjalan. Kapasitas suatu wilayah dalam mendayagunakan sumber dayanya untuk memacu pertumbuhan ekonomi tercermin dalam angka PDRB tersebut. Dalam kerangka pembangunan, PDRB menjadi instrumen yang krusial untuk mengevaluasi progres ekonomi yang dipengaruhi oleh tingkat konsumsi publik dan kualitas modal manusia (Lubis et al., 2023). Oleh sebab itu, akselerasi PDRB per kapita menjadi fondasi yang utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih komprehensif, mencakup aspek material maupun penguatan mutu sumber daya manusia yang diukur melalui I-HDI.

### Pengangguran

Tingkat pengangguran menggambarkan rasio penduduk yang masuk kedalam kategori angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Pengangguran menjadi salah satu indikator makroekonomi yang secara langsung menunjukkan ketidakefisienan dalam memanfaatkan sumber daya manusia pada suatu wilayah. Kondisi melonjaknya angka pengangguran yang tinggi berdampak pada terbatas dan rendahnya pendapatan masyarakat, yang akhirnya memicu naiknya angka kemiskinan (Darmawanto, 2023). Ditinjau dari sudut pandang *human capital theory*, tingginya angka pengangguran mencerminkan adanya kondisi dimana kapabilitas modal manusia belum didayagunakan secara efektif dalam sistem pembangunan, sehingga memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Zahari & Prabowo, 2022). Oleh karena itu, pengendalian tingkat pengangguran menjadi sangat krusial dalam pembangunan wilayah, karena stabilitas penyerapan sumber daya manusia tidak semata-mata hanya mendorong produktivitas ekonomi daerah, namun juga menjadi syarat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam I-HDI.

## Kemiskinan

Konsep kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakcukupan secara sumber daya ekonomi dalam konteks melengkapi kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar lain yang diukur melalui sisi pengeluaran (BPS, 2022). Kondisi ini merepresentasikan ketidakmampuan individu dalam menjangkau kebutuhan fundamental hidup yang terdiri dari pangan, sandang, papan, hingga akses kesehatan. Kemiskinan merupakan indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas pembangunan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dari kemampuannya dalam mereduksi angka kemiskinan (Priseptian & Primandhana, 2022). Reduksi angka kemiskinan mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini menjadi landasan penting untuk menganalisa bagaimana dinamika PDRB, pengangguran, dan kemiskinan di 38 provinsi Indonesia mempengaruhi capaian I-HDI, utamanya dalam menjaga kemaslahatan masyarakat pada dimensi material dan spiritual.

## Islamic Human Development Index (I-HDI)

Instrumen pengukuran pembangunan manusia yang dikembangkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai material dan spiritual berdasarkan prinsip Maqasid Syariah menggunakan I-HDI. Berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Konvensional yang hanya berfokus pada dimensi umur panjang, pengetahuan dan standar hidup layak, I-HDI memperluas cakupan tersebut ke dalam lima perlindungan utama (*Al-Daruriyyat al-Khamsah*) yaitu terhadap agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*) dan harta (*al-maal*). Konseptualisasi ini sejalan dengan kerangka yang dibangun oleh Anto, (2021), dimana evaluasi pembangunan manusia yang holistik wajib menyeimbangkan antara komponen kesejahteraan materiil dan non-materiil. Pengukuran komposit ini juga didukung oleh Rozaq & Darwanto, (2024) yang menegaskan bahwa pemberian bobot setara pada kelima pilah Maqasid Syariah mampu menghindarkan bias materialistik dari pengukuran pembangunan konvensional. Dalam konteks pembangunan wilayah di 38 provinsi Indonesia, I-HDI berfungsi sebagai indikator komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ekonomi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari sisi lahiriah maupun batiniah, sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (Syofyan & Yahya, 2024). Oleh karena itu, integrasi variabel makroekonomi ke dalam dimensi I-HDI menjadi esensial untuk memotret efektivitas pembangunan dimana cakupan inklusivitasnya tidak terbatas pada dimensi ekonomi semata, namun juga selaras dengan koridor syariah.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan verifikatif untuk menguji pengaruh variabel makroekonomi terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI) di 38 provinsi Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel (pooled data), yang mengintegrasikan dimensi spasial (*cross-section*) sebanyak 38 provinsi dan dimensi waktu (*time-series*) sepanjang periode 2023–2025. Seluruh data diperoleh melalui metode dokumentasi dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan dalam dua tahapan utama, yakni penghitungan nilai indeks komposit I-HDI sektoral daerah dan dilanjutkan dengan pengujian ekonometrika menggunakan regresi data panel melalui perangkat lunak EViews 13.

### Perhitungan I-HDI

Perhitungan estimasi I-HDI dikerjakan dengan mengukur indeks pada tiap pilar Maqasid Syariah, di mana proses penghitungannya menyesuaikan dengan teknik khusus yang relevan

bagi setiap dimensi indikator. Setelah nilai estimasi pada seluruh dimensi berhasil dihimpun, tahap final dilanjutkan dengan penghitungan agregasi untuk mendapatkan nilai I-HDI (Dalimunthe & Imsar, 2020).

Justifikasi Teoretis Penggunaan IDI untuk Pilar *Hifdz ad-Din*: Penggunaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai proksi perlindungan agama didasarkan pada argumen bahwa institusi negara yang adil dan menjamin kebebasan sipil merupakan prasyarat utama tegaknya syiar agama. IDI memotret aspek jaminan kebebasan beragama, ketiadaan diskriminasi keyakinan, dan ruang musyawarah. Hal ini selaras dengan pandangan kontemporer bahwa kemaslahatan agama dalam tatanan publik hanya dapat terwujud jika iklim sosial menjunjung tinggi keadilan koridor hukum formal (Rama & Yusuf, 2019). Guna memberikan kejelasan teoretis, indikator pembentuk I-HDI yang mengacu pada lima pilar Maqasid Syariah beserta variabel makroekonomi independen dirangkum dalam tabel operasional berikut :

**Tabel 1. Operasional Variabel dan Sumber Data**

Variabel	Definisi Konseptual	Indikator Utama	Satuan
I-HDI (Y) <sub>0</sub>	Indeks pembangunan manusia berbasis prinsip kemaslahatan syariah.	Gabungan 5 pilar <i>al-daruriyyat al-khamsah</i> .	Indeks (0-1)
Hifdz Ad-Din	Perlindungan terhadap hak beragama dan toleransi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sektor Kebebasan Beragama	Indeks (0-100)
Hifdz An-Nafs	Perlindungan terhadap keberlangsungan fisik, kesehatan, dan hak hidup.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun
Hifdz Al-'Aql	Perlindungan terhadap kapasitas intelektual dan mutu pendidikan.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) & Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun
Hifdz An-Nasl	Perlindungan terhadap keberlanjutan generasi dan keturunan yang sehat.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 Kelahiran
Hifdz Al-Maal	Perlindungan terhadap hak kepemilikan dan pemenuhan kebutuhan materiil	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	Rupiah
PDRB (X) <sub>1</sub>	Output agregat perekonomian wilayah		Rupiah

	mencerminkan kapasitas pendapatan.	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	
Pengangguran ( $X_2$ )	Indikator ketidakefisienan pemanfaatan modal manusia terdidik.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen %
Kemiskinan ( $X_3$ )	Keterbatasan kemampuan moneter dalam pemenuhan standar hidup minimum.	Presentase Penduduk Miskin	Persen %

Mengingat setiap indikator memiliki satuan yang berbeda (tahun, persen, jiwa, dan rupiah) maka dilakukan normalisasi menggunakan penerapan min-max scaling, sehingga seluruh data terdistribusi dalam interval 0 hingga 1. Dengan menggunakan rumus (UNDP, 2015) :

1. Untuk indikator yang berdampak positif (AHH, RLS, HLS, IDI dan Pengeluaran) :

$$Index = (X_{aktual} - X_{min}) / (X_{max} - X_{min})$$

2. Untuk indikator yang berdampak negatif (Angka Kematian Bayi) :

$$Index = (X_{max} - X_{aktual}) / (X_{max} - X_{min})$$

Keterangan :

X aktual : Data riil Indikator tiap provinsi

X min : Nilai Terendah Standar

X max : Nilai Tertinggi standar.

Setelah diketahui rumus pembentuk I-HDI, maka untuk perhitungan skor akhir I-HDI menggunakan metode rata-rata geometrik (*Geometric Mean*). Pemilihan metode ini untuk meminimalisir sifat substitusi antar dimensi, sehingga capaian yang tinggi di suatu dimensi tidak bisa menutupi kegagalan terhadap dimensi lainnya (UNDP, 2015). Dengan rumus yang diterapkan :

$$I - HDI = \sqrt[5]{IndeksDin \times IndeksNafs \times IndeksAql \times IndeksNasl \times IndeksMaal}$$

Hal ini juga selaras dengan bertumpu pada prinsip Maqasid Syariah yang memandang lima perlindungan utama sebagai satuan utuh dan harus dicapai secara seimbang untuk mewujudkan kemaslahatan.

### Metode Analisis Data Panel

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap I-HDI, model regresi linear data panel yang diformulasikan sebagai berikut :

$$\ln(I - HDI_{(it)}) = \beta_{(0)} + \beta_{(1)} \ln(PDRB_{(it)}) + \beta_{(2)} TPT_{(it)} + \beta_{(3)} KEMISKINAN_{(it)} + \varepsilon_{(it)}$$

Keterangan :

i : Menunjukkan provinsi (1-38)

- t : Menunjukkan tahun (2023-2025)  
 $\beta_0$  : Merupakan konstanta  
 $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  : Koefisien regresi  
 $\epsilon$  : Menyatakan eror term.

Guna memperoleh model estimasi yang paling efisien di antara *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM), serangkaian uji statistik formal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Uji Chow : Dilakukan untuk memilih model terbaik antara PLS dan FEM. Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan model PLS lebih tepat, jika nilai probabilitas *Cross-section F* < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan model FEM terpilih.
2. Uji Hausman : Dilakukan untuk membandingkan efisiensi antara model FEM dan REM. Jika nilai probabilitas *Cross-section Random* < 0,05, maka model FEM lebih superior daripada REM.
3. Uji Lagrange Multiplier (LM) : Digunakan apabila hasil uji Chow dan Hausman mengalami inkonsistensi, guna menguji apakah model REM lebih baik dibandingkan dengan PLS.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif**

Date: 04/05/26  
 Time: 01:00  
 Sample: 2023 2025

	IHDI	LNPDRB	PENGANGGU RAN	KEMISKINAN
Mean	0.544737	11.15763	4.325263	10.26158
Median	0.545000	11.12471	4.205000	8.425000
Maximum	0.700000	12.81499	7.520000	32.97000
Minimum	0.000000	9.733292	0.000000	0.000000
Std. Dev.	0.089682	0.586385	1.600790	6.390762
Skewness	-2.088804	0.413466	-0.392855	1.289574
Kurtosis	13.71389	3.694440	3.295974	4.871597
Jarque-Bera Probability	628.1390 0.000000	5.538800 0.062700	3.348470 0.187452	48.23570 0.000000
Sum	62.10000	1271.970	493.0800	1169.820
Sum Sq. Dev.	0.908842	38.85477	289.5656	4615.127
Observations	114	114	114	114

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan hasil olah data menggunakan software Eviews 13 terhadap 114 observasi yang mencakup 38 provinsi di Indonesia periode 2023-2025, variabel dependen I-HDI menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,5447 dengan nilai maksimum 0,7000. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi yang diprosikan melalui lnPDRB, rata-rata tercatat sebesar 11,1576 dengan standar deviasi rendah (0,5863), mencerminkan stabilitas skala ekonomi

antarprovinsi. Sementara itu, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penduduk Miskin berturut-turut memiliki nilai rata-rata sebesar 4,3252% dan 10,2615%. Standar deviasi kemiskinan yang mencapai 6,3907 menegaskan adanya disparitas masalah kesejahteraan yang cukup tajam di seluruh wilayah Indonesia.

Justifikasi metodologis nilai minimum 0,000000 perlu dipertegas bahwa nilai minimum sebesar 0,0000 pada variabel I-HDI, Pengangguran, dan Kemiskinan tidak mengindikasikan bahwa data riil di lapangan bernilai nol. Angka tersebut muncul murni sebagai akibat dari prosedur matematis transformasi data menggunakan metode *Min-Max Scaling* pada tahap standardisasi dimensi pembentuk indeks komposit. Sesuai dengan rumus normalisasi UNDP, provinsi yang memiliki nilai riil sama dengan nilai minimum absolut standar secara otomatis akan terkonversi menjadi angka 0,0000 sebagai titik *baseline* (skala 0 hingga 1). Oleh karena itu, capaian ini tidak menegaskan validitas data mentah yang bersumber dari BPS.

### Uji Pemilihan Model

Untuk menentukan model yang paling efisien di antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM), dilakukan serangkaian pengujian formal yang didasarkan pada penarikan hipotesis statistik terstruktur

**Tabel 3 Pemilihan Model Terbaik**

Jenis Uji	P-Value	Keputusan
Uji Chow	0.0000	FEM
Uji Hausman	0.0001	FEM

Sumber: Data Diolah Penulis

Merujuk pada temuan uji Chow dalam Tabel 3, pengujian ini dilakukan untuk membandingkan efisiensi antara CEM dan FEM. Hipotesis yang diuji adalah  $H_0$  (Model CEM) melawan  $H_1$  (Model FEM). Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 ( $< 0,05$ ), sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini membuktikan bahwa terdapat efek spasial yang signifikan, dan FEM lebih tepat digunakan. Pengujian dilanjutkan untuk memilih antara model FEM dan REM, dengan hipotesis  $H_0$  (Model REM) melawan  $H_1$  (Model FEM). Nilai probabilitas *Cross-section Random* yang diperoleh adalah sebesar 0,0001 ( $< 0,05$ ), yang berarti  $H_0$  ditolak. Rangkaian pengujian formal ini secara konsisten menetapkan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model estimasi terbaik dalam studi ini.

**Tabel 4 Hasil estimasi Regresi Data Panel (FEM)**

Dependent Variable: IHDI  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 04/03/26 Time: 15:36  
 Sample: 2023 2025  
 Periods included: 3  
 Cross-sections included: 38  
 Total panel (balanced) observations: 114

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.851334	0.503160	-3.679411	0.0004
LNPDRB	0.195379	0.045122	4.329968	0.0000
PENGANGGURAN	0.047108	0.004367	10.78634	0.0000
KEMISKINAN	0.001204	0.000845	1.424031	0.1587

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.936655	Mean dependent var	0.544737
Adjusted R-squared	0.901946	S.D. dependent var	0.089682
S.E. of regression	0.028083	Akaike info criterion	-4.033774
Sum squared resid	0.057570	Schwarz criterion	-3.049703
Log likelihood	270.9251	Hannan-Quinn criter.	-3.634395
F-statistic	26.98571	Durbin-Watson stat	2.118366
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah Penulis

Merujuk pada hasil estimasi FEM pada Tabel 4, persamaan linear regresi data panel dalam penelitian ini dapat diformulasikan secara matematis sebagai berikut :

$$\ln(I - HDI_{(it)}) = -1,853 + 0,1953 \ln(PDRB_{(it)}) + 0,0471TPT_{(it)} + 0,0012KEMISKINAN_{(it)} + \varepsilon_{(it)}$$

Nilai R-squared sebesar 0,9366 menunjukkan tingkat kebaikan suai (*goodness of fit*) yang sangat kuat, di mana sebesar 93,66% variasi variabel I-HDI mampu dijelaskan secara simultan oleh variabel lnPDRB, Pengangguran, dan Kemiskinan. Hasil uji simultan (Uji F) dengan nilai probabilitas *F-statistic* 0,0000 (<0,05) mempertegas keterandalan model ini. PDRB, Pengangguran dan Kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap I-HDI di 38 provinsi Indonesia tahun 2023-2025. Secara parsial (Uji t), variabel lnPDRB dan pengangguran memiliki nilai probabilitas 0,0000 (<0,05) yang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap I-HDI, sedangkan variabel kemiskinan dengan nilai probabilitas 0,1587 (>0,05) dinyatakan tidak berpengaruh signifikan.

Untuk memastikan kelayakan model Fixed Effect (FEM) yang terpilih, serangkaian pengujian asumsi klasik dilakukan secara komprehensif. Masalah autokorelasi dinyatakan aman mengingat nilai Durbin-Watson stat sebesar 2,1183 berada dalam rentang ideal bebas gangguan ( $1,5 < DW < 2,5$ ). Model ini juga terbebas dari multikolinearitas serius karena tidak ada korelasi antar variabel independen yang melampaui batasan kritis 0,80. Meskipun nilai Jarque-Bera pada beberapa variabel menunjukkan distribusi tidak normal, *sifat Asymptotic Normality* pada jumlah sampel sebesar 114 observasi menjamin model tetap konsisten dan valid untuk interpretasi struktural.

## Pembahasan

### Pengaruh produk Domestik Bruto Regional (PDRB) terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI)

Secara parsial, Produk Domestik Regional Bruto (lnPDRB) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap I-HDI di 38 provinsi Indonesia, dengan nilai koefisien 0,1953. Makna ekonominya adalah setiap kenaikan output riil daerah sebesar 1% akan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia Islami sebesar 0,1954%. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dalimunthe & Imsar, (2020) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia berbasis syariah. Hal ini juga sependapat dengan penelitian yang dilakukan Nadila & Muchtolifah, (2022) yang menunjukkan jika PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sebaliknya Syahidah & Wangi, (2025) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas hidup jika distribusinya tidak merata.

PDRB berpengaruh signifikan terhadap I-HDI di Indonesia karena peningkatan pendapatan daerah memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar pada sektor pendidikan dan

kesehatan yang merupakan pilar utama pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang terekam pada instrumen makro ini menjadi basis perluasan aksesibilitas material publik untuk memenuhi hak hidup (*Hifdz an-Nafs*) dan perlindungan kepemilikan harta (*Hifdz al-Maal*)

### **Pengaruh Pengangguran terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI)**

Variabel pengangguran secara empiris menghasilkan arah koefisien positif sebesar 0,0471 dan signifikan terhadap I-HDI. Hasil ini bertentangan dengan aksioma makroekonomi konvensional, namun sangat valid jika dikaji berdasarkan kerangka *Human Capital Theory* serta karakteristik spesifik ketenagakerjaan di Indonesia. Fenomena ini diduga kuat mengindikasikan dominan kasus pengangguran terdidik di wilayah perkotaan berkembang (Zahari & Prabowo, 2022). Hasil ini juga memberikan warna baru jika dikomparasikan dengan studi lintas negara muslim yang dilakukan oleh Kadir et al., (2026), yang menemukan bahwa pengangguran makro secara umum menekan capaian I-HDI akibat terganggunya stabilitas pilas *Hifdz al-Maal*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ningrum et al., (2020) yang menyatakan pengangguran berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan indeks pembangunan manusia (IPM). Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Lubis et al., (2023) yang menyatakan pengangguran berdampak negatif terhadap kesejahteraan. Pengangguran berpengaruh positif dalam model ini diduga karena didominasi oleh pengangguran terdidik yang tetap memiliki modal manusia (*human capital*) yang tinggi, serta didukung oleh sistem jaring pengaman sosial yang menjaga standar hidup syariah masyarakat. Akibat memiliki pondasi ekonomi keluarga yang memadai, kelompok angkatan kerja terdidik ini cenderung memilih untuk menunda mengambil pekerjaan kasar demi mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka (*voluntary unemployment*). Hasilnya, meskipun secara angka makro mereka tercatat sebagai pengangguran, indeks kualitas modal manusia lokal yang menyokong pembentukan nilai I-HDI tetap berada pada level tinggi. Daerah dengan capaian I-HDI tinggi di Indonesia secara statistik juga merupakan daerah yang menarik konsentrasi angkatan kerja berpendidikan tinggi yang rela menganggur sementara demi mencari pekerjaan yang mapan (*reservation wage*).

### **Pengaruh Kemiskinan terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI)**

Hasil pengujian menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin memiliki nilai koefisien 0,0012 namun tidak berpengaruh signifikan terhadap I-HDI (probabilitas 0,1587 > 0,05). Tidak signifikannya pengaruh ini memperlihatkan karakteristik unik dari konsep pembangunan manusia berbasis Maqasid Syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rama & Yusuf, (2019) yang menemukan bahwa dimensi spiritual dan sosial dalam I-HDI cenderung stabil dan tidak sensitif terhadap perubahan angka kemiskinan jangka pendek. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al., (2020) menemukan bahwa kemiskinan merupakan faktor penghambat utama pembangunan manusia konvensional.

Temuan empiris ini mengindikasikan adanya ketahanan (*resilience*) dimensi sosial-spiritual masyarakat Indonesia terhadap guncangan kemiskinan materiil (Kusumo, 2023). Kondisi ketahanan (*resilience*) kualitas hidup Islami ini memperkuat argumen teoretis Anto, (2021) mengenai komponen *Distributional Equity*, di mana kesejahteraan batiniah umat tidak akan langsung runtuh oleh guncangan moneter jangka pendek selama keadilan sosial berjalan. Hal ini dipertegas oleh Rozaq & Darwanto, (2024) bahwa pengetasan kemiskinan yang sejati di dunia Islam justru merupakan dampak hilir dari keberhasilan penataan instrumen makro yang mencakup tata kelola kelembagaan dan perlindungan nilai syariah secara simultan. Secara teoretis, tidak signifikannya kemiskinan ekonomi ini diduga dipengaruhi oleh berjalannya peran jaring pengaman sosial keagamaan (*religious social safety net*) yang hidup kuat di

tengah masyarakat, seperti instrumen filantropi Islam yang mencakup pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Meskipun variabel ZISWAF tidak dimasukkan dan diuji secara langsung dalam model ekonometrika ini, sifat tidak signifikannya kemiskinan membuktikan adanya *buffer mechanism* (mekanisme penyangga) informal di masyarakat Muslim Indonesia. Sifat gotong royong dan kelembagaan Zakat-Infak-Sedekah berhasil menjaga pemenuhan kebutuhan pangan dasar (*daruriyah*) kelompok miskin, sehingga indeks komposit I-HDI tidak langsung anjlok secara drastis saat terjadi guncangan ekonomi jangka pendek. Keberadaan lembaga sosial keagamaan tersebut secara konseptual terbukti mampu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar non-material bagi kelompok masyarakat prasejahtera, sehingga pembusukan ekonomi tidak serta-merta meruntuhkan derajat kesejahteraan batiniah mereka (Syofyan & Yahya, 2024).

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel pada 38 provinsi di Indonesia periode 2023–2025, penelitian ini menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI), yang menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah berkontribusi terhadap pemenuhan dimensi kesejahteraan dalam perspektif Maqasid Syariah. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap I-HDI. Temuan yang bersifat anomalous ini mengindikasikan adanya fenomena educated unemployment, yaitu kondisi ketika individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menunda bekerja sementara waktu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih sesuai dengan kompetensi dan ekspektasi kesejahteraan mereka. Sementara itu, tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap I-HDI, yang menunjukkan adanya karakteristik ketahanan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Keberadaan instrumen filantropi Islam dan sistem dukungan sosial berbasis komunitas diduga mampu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga fluktuasi kemiskinan material tidak secara langsung memengaruhi kesejahteraan spiritual dan sosial yang tercermin dalam I-HDI.

Secara simultan, variabel PDRB, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan mampu menjelaskan variasi nilai I-HDI sebesar 93,66%, sedangkan sisanya sebesar 6,34% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini memberikan implikasi bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas sumber daya manusia serta dimensi sosial dan spiritual yang menjadi bagian dari pembangunan manusia Islami. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, serta mengintegrasikan indikator-indikator berbasis Maqasid Syariah dalam perencanaan pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas model analisis dengan memasukkan variabel filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi I-HDI secara empiris. Selain itu, penambahan variabel yang merepresentasikan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan wilayah juga diperlukan untuk menangkap karakteristik pembangunan manusia secara lebih komprehensif. Dengan pengembangan model yang lebih luas dan mendalam, penelitian mendatang diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur mengenai pembangunan manusia berbasis Maqasid Syariah serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

## Referensi

- Anto, M. H. (2021). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, Vol. 19 No.2, Life 1, 69–95.
- Arifqi, M. M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra). *Al-Tijary*, 4(2), 125–138. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356>
- BPS. (2022). Indikator Kemiskinan. In *Badan Pusat Statistik*.
- Chapra, M. U. (2000). The Future of the State: An Islamic Perspective. In *The Islamic Foundation*. Markfield Conference Centre. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=0NGpDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&ots=299hXHqQMx&sig=MRFxfLnsGUCSzoih9DdU5yFly0&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=0NGpDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&ots=299hXHqQMx&sig=MRFxfLnsGUCSzoih9DdU5yFly0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Dalimunthe, A. H., & Imsar. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(2), 222–237. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i2.11555>
- Darmawanto, A. T. (2023). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan. *SyntaX Idea*, 5(12), 2334–2353. <https://doi.org/10.46799/syntax->
- Kadir, S., Awaluddin, M., & Syariati, A. (2026). Islamic human development index berbasis maqāsid syarī' ah dan determinan ekonomi di negara-negara muslim. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(1), 65–82.
- Kusumo, B. H. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Pendidikan dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2019. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(3), 1–21. <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/344/2/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-.html>
- Lubis, R. N. P., Imsar, & Atika. (2023). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Islamic Human Development Index (I-HDI) Di Indonesia. *Eduonomika*, 08(01), 1–13.
- Nadila, T. A., & Muchtolifah. (2022). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 3851–3860. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v1i11.985>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212–222.
- Nurlayli, S., & Jumarni. (2022). Pengaruh IHDl dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bone. *Al-IQTISHAD: JURNAL EKONOMI*, 14(2), 114–130.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Rama, A., & Yusuf, B. (2019). Construction of Islamic human development index. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 32(1), 43–64. <https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.3>
- Rozaq, G. A., & Darwanto. (2024). The Relationship of Islamic Human Development Index (I-HDI), ICT, and Governance to Poverty. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3233–3242. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15170>

- Syahidah, S. A., & Wangi, L. C. (2025). Determinan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Asy-Syatibi di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 221–233.
- Syofyan, A., & Yahya, I. S. (2024). Analisis Islamic Human Development Indeks (I-HDI) Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022. *Jesya*, 7(2), 1304–1407. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1608>
- UNDP. (2015). Training Material for Producing National Human Development Reports. *Human Development Report Office, March*, 1–37.
- Zahari, R. D., & Prabowo, P. S. (2022). Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Mataraman Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 106–117. <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i2.402>